



**IMPLEMENTASI
ADMINISTRASI
HUBUNGAN SEKOLAH
DENGAN
KOMITE SEKOLAH
DAN MASYARAKAT
DI MI MUHAMMADIYAH
TARAMAN SIDOHARJO
SRAGEN**

Alexandria Threedy Jannatun Nisa
Amin Ayu Permatasari
Harun Arasid
Muhammad Hamam Hanif

IMPLEMENTASI ADMINISTRASI HUBUNGAN
SEKOLAH DENGAN KOMITE SEKOLAH DAN
MASYARAKAT DI MI MUHAMMADIYAH TARAMAN
SIDOHARJO SRAGEN

Alexandria Threedy Jannatun Nisa
Amin Ayu Permatasari
Harun Arasid
Muhammad Hamam Hanif



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

IMPLEMENTASI ADMINISTRASI HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN KOMITE SEKOLAH DAN MASYARAKAT DI MI MUHAMMADIYAH TARAMAN SIDOHARJO SRAGEN

Penulis:

Alexandria Threedy Jannatun Nisa
Amin Ayu Permatasari
Harun Arasid
Muhammad Hamam Hanif

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

viii, 113, Uk: 15,5 x 23 cm

QRCBN: 62-415-8390-010

Cetakan Pertama:

Agustus 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group

All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul "Implementasi Administrasi Hubungan Sekolah dengan Komite Sekolah dan Masyarakat di MI Muhammadiyah Taraman Sidoharjo Sragen" dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Hubungan yang harmonis antara sekolah, komite sekolah, dan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, melalui buku ini penulis berusaha menguraikan konsep, landasan teori, serta implementasi hubungan sekolah dengan komite sekolah dan masyarakat yang ditemukan di lapangan. Diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi mahasiswa, pendidik, maupun pembaca yang memiliki perhatian terhadap bidang administrasi pendidikan.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu kontribusi sederhana dalam pengembangan ilmu administrasi pendidikan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENGERTIAN ADMINISTRASI HUBUNGAN SEKOLAH 1	
A. Hakikat Dan Konsep Dasar Administrasi Hubungan Sekolah ..	1
B. Tujuan Strategis Administrasi Hubungan Sekolah	3
C. Fungsi-Fungsi Manajemen Hubungan Sekolah.....	4
D. Urgensi Kemitraan Sekolah Dan Pihak Eksternal	6
E. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Hubungan Sekolah	8
BAB 2 KAJIAN TEORI DAN LANDASAN HUKUM	11
A. Teori Manajemen Pendidikan Berbasis Partisipasi Masyarakat...	11
B. Landasan Konstitusional (UUD 1945).....	12
C. Landasan Yuridis: Uu Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas	13
D. Landasan Otonomi Daerah: Uu Nomor 23 Tahun 2014	15
E. Regulasi Sektoral: PP No. 17 Tahun 2010 Dan PP No. 19 Tahun 2005	16
BAB 3 RUANG LINGKUP ADMINISTRASI HUBUNGAN MASYARAKAT.....	19
A. Kemitraan Multipihak: Pemerintah, Dunia Usaha, Dan Perguruan Tinggi	19
B. Strategi Publikasi Program Kerja Dan Prestasi Sekolah	20
C. Manajemen Penyampaian Informasi Akademik Secara Terbuka	22
D. Pengelolaan Citra Lembaga Pendidikan (<i>School Branding</i>).....	22
E. Mekanisme Penanganan Aspirasi, Kritik, Dan Pengaduan Publik.....	23

BAB 4 DASAR HUKUM ADMINISTRASI HUBUNGAN	
MASYARAKAT SEKOLAH.....	25
A. Tinjauan Kemendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah	25
B. Implementasi Asas Transparansi Berdasarkan Uu Keterbukaan Informasi Publik.....	26
C. Peraturan Pemerintah Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan	27
D. Batasan Yuridis Penggalangan Dana Dan Sumber Daya Masyarakat	28
E. Penegakan Sanksi Dan Implikasi Hukum Maladministrasi Hubungan Sekolah.....	30
BAB 5 HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN KOMITE	31
A. Pengertian, Kedudukan, Dan Struktur Organisasi Komite Sekolah	31
B. Analisis Empat Peran Utama Komite Sekolah.....	32
C. Tugas Eksklusif Dan Tanggung Jawab Komite Sekolah.....	34
D. Pengelolaan Jejaring Komunikasi Alumni Sekolah	35
E. Sinergi Komite Dengan Hubungan Masyarakat Dan Orang Tua Siswa.....	37
BAB 6 HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT	39
A. Pengertian, Tujuan, Dan Fungsi Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat	39
B. Jenis-Jenis Hubungan Administrasi Sekolah Dengan Masyarakat	41
C. Bentuk Dan Teknik Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat..	43
D. Implementasi Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat Di Lembaga Pendidikan.....	47

BAB 7 HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN ORANG TUA.....	53
A. Tujuan Hubungan Sekolah Dengan Orang Tua	53
B. Pendekatan Manajerial Oleh Kepala Sekolah Untuk Hubungan Sekolah Dengan Orang Tua	55
C. Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak.....	57
D. Dampak Hubungan Sekolah Dan Orang Tua Terhadap Mutu Pendidikan Dan Perkembangan Peserta Didik	59
BAB 8 STRATEGI MENINGKATKAN HUBUNGAN YANG EFEKTIF	62
A. Membangun Komunikasi Yang Terbuka Dan Berkelanjutan...	63
B. Meningkatkan Partisipasi Orang Tua Dalam Program Sekolah	64
C. Penguatan Kerjasama Antara Guru Dan Orang Tua	65
D. Pemanfaatan Teknologi Sebagai Media Komunikasi	66
E. Evaluasi Dan Tindak Lanjut Hubungan Sekolah Dengan Orang Tua	67
BAB 9 STRATEGI PENGUATAN HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT.....	68
A. Penguatan Transparansi Dan Akuntabilitas Sekolah Kepada Masyarakat	68
B. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pendidikan.....	69
C. Pengembangan Kemitraan Sekolah Dengan Dunia Industri Dan Usaha	69
D. Optimalisasi Media Komunikasi Sekolah Dan Masyarakat	70
E. Strategi Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sekolah.....	71

BAB 10 HAMBATAN DAN SOLUSI.....	72
A. Hambatan Hubungan Sekolah Dan Masyarakat	72
B. Bentuk Konflik Komunikasi Antara Sekolah Dan Masyarakat	75
C. Dampak Konflik Komunikasi Terhadap Hubungan Sekolah Dan Masyarakat	76
D. Peran Sekolah Dalam Mencegah Konflik Komunikasi	80
E. Strategi Meningkatkan Komunikasi Sekolah Dan Masyarakat	82
BAB 11 CONTOH ADMINISTRASI DI SEKOLAH.....	85
A. Model Komunikasi Humas Dan Dua-Arah Simetris Vs Dua- Arah Asimetris.....	85
B. Teori Stakeholder, Kepercayaan Publik, Dan Nilai Bersama Point.....	87
C. Peran Teknologi, Media Sosial, Dan Komunikasi Digital Point	88
D. Evaluasi, Keberlanjutan Program, Dan Teori Peran Kepemimpinan Point	90
BAB 12 IMPLEMENTASI ADMINISTRASI HUBUNGAN MASYARAKAT.....	91
A. Gambaran Umum Sekolah.....	91
B. Pelaksanaan Administrasi Hubungan Sekolah Dengan Komite Sekolah Dan Masyarakat Di MI Muhammadiyah Taraman.....	93
C. Refleksi Dan Pembelajaran Dari Lapangan	96
DAFTAR PUSTAKA.....	101
PROFIL PENULIS	108

BAB 1

PENGERTIAN ADMINISTRASI HUBUNGAN SEKOLAH

A. HAKIKAT DAN KONSEP DASAR ADMINISTRASI HUBUNGAN SEKOLAH

Administrasi hubungan sekolah merupakan substansi spesifik dari administrasi pendidikan yang berfokus pada pengelolaan interaksi, komunikasi, dan kemitraan antar lembaga sekolah dengan lingkungan eksternalnya. Secara teoritis, administrasi pendidikan diartikan sebagai keseluruhan proses pengelolaan sumber daya pendidikan, baik manusia, sarana prasarana, anggaran, maupun program yang digerakkan secara sistematis dan terintegrasi demi mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Arikunto & Yuliana, 2012).

Administrasi dalam konteks hubungan sekolah ini berfungsi mengelola jembatan komunikasi dua arah agar terjadi integrasi yang harmonis antara kebutuhan belajar di sekolah dan aspirasi sosial di masyarakat (Burhanuddin, 2014). Konsep hubungan sekolah tidak sekadar dipandang sebagai aktivitas humas (hubungan masyarakat) yang bersifat publikasi searah, melainkan sebuah manifestasi dari manajemen berbasis sekolah yang mengedepankan prinsip keterbukaan, kemitraan sejajar, dan akuntabilitas publik (Mulyasa, 2019).

Lebih jauh, hakikat administrasi hubungan sekolah bertumpu pada pemahaman bahwa sekolah bukanlah entitas yang berdiri

sendiri dan terpisah dari lingkungan sosialnya. Sekolah lahir dari dan untuk masyarakat, sehingga kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada dukungan, kepercayaan, dan partisipasi aktif dari komunitas sekitarnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Pidarta (2009) yang menegaskan bahwa sekolah sebagai lembaga sosial memiliki kewajiban untuk senantiasa berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat demi menjaga relevansinya sebagai agen perubahan sosial.

Secara konseptual, administrasi hubungan sekolah mencakup tiga dimensi utama, yakni dimensi komunikasi, dimensi koordinasi, dan dimensi kolaborasi. Dimensi komunikasi menekankan pentingnya penyampaian informasi yang tepat, akurat, dan berkelanjutan antara sekolah dengan para pemangku kepentingan eksternal. Dimensi koordinasi mencakup upaya menyinkronkan berbagai program dan kegiatan sekolah dengan agenda masyarakat sehingga tercipta sinergi yang produktif. Adapun dimensi kolaborasi mewujudkan kemitraan strategis yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara bersama-sama (Daryanto, 2011).

Pemahaman yang mendalam tentang hakikat administrasi hubungan sekolah menjadi sangat penting bagi para pengelola pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang tinggi, termasuk kemampuan membangun relasi yang harmonis dengan berbagai pihak eksternal. Tanpa pengelolaan hubungan sekolah yang baik, berbagai program unggulan yang dirancang sekolah tidak akan mendapatkan dukungan yang memadai dari masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pendidikan pun akan terhambat (Sagala, 2013).

B. TUJUAN STRATEGIS ADMINISTRASI HUBUNGAN SEKOLAH

Pelaksanaan administrasi hubungan sekolah didesain untuk mencapai beberapa tujuan krusial dalam ekosistem pendidikan (Fattah, 2012). Tujuan-tujuan ini bukan sekadar target operasional semata, melainkan merupakan komitmen strategis jangka panjang yang menentukan arah pengembangan lembaga pendidikan secara menyeluruh. Secara lebih rinci, tujuan utamanya mencakup aspek-aspek berikut:

1. Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Tujuan paling mendasar dari administrasi hubungan sekolah adalah memperoleh dukungan nyata baik berupa pemikiran, dana, tenaga, maupun fasilitas pendukung dari masyarakat guna peningkatan kualitas pembelajaran. Mutu pendidikan tidak dapat ditingkatkan hanya dengan mengandalkan sumber daya internal sekolah yang seringkali terbatas. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi variabel kunci yang menentukan seberapa jauh peningkatan mutu itu dapat dicapai. Partisipasi masyarakat dalam bentuk donasi buku, penyediaan narasumber ahli, maupun keterlibatan dalam program ekstrakurikuler terbukti mampu memperkaya pengalaman belajar peserta didik secara signifikan (Mulyasa, 2019).

2. Membangun Kepercayaan Publik (*Public Trust*).

Sekolah yang mampu menciptakan transparansi tata kelola lembaga akan memperoleh sentimen positif dan keyakinan tinggi dari masyarakat terhadap kredibilitasnya (Burhanuddin, 2014). Kepercayaan publik ini dibangun melalui serangkaian tindakan nyata, bukan sekadar retorika. Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, kejujuran dalam menyampaikan capaian dan kendala, serta responsivitas terhadap masukan masyarakat merupakan

fondasi utama terciptanya kepercayaan publik yang kokoh. Sekolah yang memiliki public trust yang tinggi akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak ketika menghadapi tantangan.

3. Menyelaraskan Program Sekolah dengan Kebutuhan Masyarakat. Administrasi hubungan sekolah bertugas mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan riil lingkungan sekitar agar output kompetensi lulusan sekolah memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan zaman. Sekolah yang peka terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakatnya akan mampu merancang kurikulum dan program pembelajaran yang benar-benar menjawab tantangan nyata yang dihadapi oleh peserta didiknya kelak setelah meninggalkan bangku sekolah.
4. Meningkatkan Rasa Memiliki (Sense of Belonging). Ketika masyarakat merasa memiliki sekolah, mereka akan secara sukarela memberikan kontribusi terbaik mereka untuk kemajuan lembaga tersebut. Administrasi hubungan sekolah bertugas menumbuhkan tanggung jawab moral bersama bahwa kemajuan pendidikan anak merupakan tugas kolektif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Rasa memiliki ini merupakan modal sosial yang sangat berharga dan tidak dapat dibeli dengan uang, melainkan hanya dapat ditumbuhkan melalui proses relasi yang tulus, konsisten, dan saling menghargai (Fattah, 2012).

C. FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN HUBUNGAN SEKOLAH

Menurut Daryanto (2011), fungsi administrasi hubungan sekolah setidaknya mencakup tiga domain operasional yang saling berkaitan. Ketiga fungsi ini bekerja secara simultan dan saling memperkuat satu

sama lain dalam membentuk ekosistem kemitraan sekolah-masyarakat yang sehat dan produktif. Ketiga fungsi tersebut yaitu:

1. Fungsi Informasi dan Komunikasi.

Dalam menjalankan fungsi informasi dan komunikasi, sekolah bertindak sebagai agen yang menyampaikan profil, program kerja, prestasi, hingga kendala yang dihadapi kepada masyarakat secara akurat dan berkala. Komunikasi yang efektif bukan hanya berarti bahwa pesan tersampaikan, tetapi juga bahwa pesan tersebut dipahami, diterima, dan mendorong respons positif dari pihak yang dituju. Untuk mencapai hal ini, administrasi hubungan sekolah perlu menguasai berbagai media dan teknik komunikasi yang sesuai dengan karakteristik audiens yang dituju. Masyarakat yang heterogen menuntut pendekatan komunikasi yang fleksibel dan adaptif, mulai dari pertemuan tatap muka, brosur cetak, hingga pemanfaatan media sosial digital.

2. Fungsi Koordinasi.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki kalender kegiatan yang padat. Di sisi lain, masyarakat dan komite sekolah pun memiliki agenda-agenda tersendiri. Fungsi koordinasi dalam administrasi hubungan sekolah bertugas menyinkronkan berbagai program sekolah dengan agenda komite atau kegiatan kemasyarakatan agar tidak terjadi tumpang tindih melainkan saling mendukung. Koordinasi yang baik menghasilkan harmoni operasional yang memungkinkan semua pihak berkontribusi secara optimal tanpa mengalami kelelahan atau konflik kepentingan (Daryanto, 2011).

3. Fungsi Kolaborasi dan Kerja Sama

Kolaborasi merupakan perwujudan paling tinggi dari hubungan sekolah dengan masyarakat. Pada tahap ini, sekolah dan

masyarakat tidak lagi berhubungan sebagai pemberi dan penerima layanan, melainkan sebagai mitra yang setara dalam memecahkan masalah bersama. Administrasi hubungan sekolah bertugas menggalang kemitraan strategis yang produktif demi memecahkan masalah-masalah internal sekolah yang membutuhkan intervensi publik, seperti pembiayaan non-personel dan penyediaan lapangan kerja bagi alumni. Kemitraan yang kokoh ini dibangun atas dasar kepercayaan mutual, komitmen bersama, dan pembagian peran yang jelas dan adil (Sagala, 2013).

Selain ketiga fungsi di atas, beberapa ahli menambahkan fungsi evaluasi sebagai dimensi keempat dari manajemen hubungan sekolah. Fungsi evaluasi mencakup kegiatan penilaian secara periodik terhadap efektivitas program-program hubungan sekolah yang telah dilaksanakan. Melalui evaluasi yang sistematis, administrasi hubungan sekolah dapat mengidentifikasi program-program yang berhasil untuk dilanjutkan dan diperkuat, serta program-program yang kurang efektif untuk direvisi atau dihentikan. Dengan demikian, pengelolaan hubungan sekolah-masyarakat dapat terus berkembang dan semakin efektif dari waktu ke waktu.

D. URGENSI KEMITRAAN SEKOLAH DAN PIHAK EKSTERNAL

Sekolah tidak dapat berdiri sendiri sebagai menara gading yang terisolasi dari realitas sosial (Pidarta, 2009). Urgensi kemitraan eksternal ini didasarkan pada kenyataan bahwa keterbatasan sumber daya internal sekolah, baik finansial maupun sarana, dapat ditutupi oleh partisipasi aktif masyarakat (Sagala, 2013). Melalui administrasi

hubungan sekolah yang dikelola secara profesional, sekolah memperoleh legitimasi sosial, dukungan moral saat menghadapi krisis, serta lingkungan sekitar yang kondusif untuk tumbuh kembang psikologis peserta didik.

Urgensi kemitraan sekolah dengan pihak eksternal semakin meningkat di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat ini. Tantangan-tantangan pendidikan abad ke-21 yang semakin kompleks, seperti kebutuhan akan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi, tidak mungkin dijawab oleh sekolah seorang diri. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk orang tua, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah, untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masa depan (Mulyasa, 2019).

Dari perspektif sumber daya, kemitraan dengan pihak eksternal memberikan akses sekolah terhadap berbagai bentuk modal yang tidak dapat diperoleh secara mandiri. Modal finansial dapat diperoleh melalui sumbangan sukarela dari orang tua dan donasi dari dunia usaha. Modal sosial dapat dibangun melalui jejaring dengan tokoh masyarakat dan alumni yang berpengaruh. Modal intelektual dapat ditingkatkan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Modal budaya dapat diperkaya melalui keterlibatan dengan komunitas-komunitas lokal yang menjadi basis peserta didik sekolah tersebut.

Dari perspektif legitimasi, sekolah yang memiliki hubungan baik dengan masyarakat akan mendapatkan pengakuan dan penerimaan yang lebih luas dari komunitas sekitarnya. Legitimasi sosial ini penting karena memberikan sekolah kepercayaan diri untuk melaksanakan program-programnya, sekaligus menjadi pelindung ketika sekolah menghadapi kritik atau tantangan dari pihak-pihak tertentu. Sekolah yang terisolasi dan tidak memiliki hubungan baik

dengan masyarakat akan sangat rentan terhadap isu negatif dan serangan reputasi yang dapat merusak citra dan mengganggu proses pembelajaran (Burhanuddin, 2014).

Bagi peserta didik sendiri, kemitraan sekolah dengan pihak eksternal memberikan manfaat langsung yang tidak ternilai. Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan terbukti secara ilmiah meningkatkan motivasi belajar dan prestasi akademik anak. Paparan terhadap dunia usaha dan industri sejak dini melalui berbagai program kemitraan membekali siswa dengan wawasan karier yang lebih luas. Sementara itu, interaksi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset dapat menginspirasi siswa untuk memiliki orientasi akademik yang lebih tinggi dan semangat keilmuan yang kuat (Hasbullah, 2017).

E. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN HUBUNGAN SEKOLAH

Administrasi hubungan sekolah agar berjalan efektif dan tidak menimbulkan benturan kepentingan, terdapat prinsip dasar yang wajib dipenuhi (Mulyasa, 2013). Prinsip-prinsip ini merupakan panduan filosofis sekaligus operasional yang harus menjadi pedoman bagi setiap pengelola hubungan sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Keterbukaan (*Integrity*)

Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus utuh, jujur, dan tidak manipulatif. Keterbukaan bukan sekadar kewajiban etis, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kepercayaan publik. Sekolah yang konsisten menerapkan keterbukaan dalam semua aspek pengelolannya akan mendapatkan kepercayaan masyarakat yang semakin kuat

dari waktu ke waktu. Sebaliknya, sekolah yang menyembunyikan informasi penting atau memanipulasi data demi menjaga citra akan kehilangan kepercayaan masyarakat dalam jangka panjang. Di era keterbukaan informasi saat ini, prinsip kejujuran dan transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak.

2. Kesenambungan (*Continuity*)

Hubungan sekolah dengan masyarakat harus dijalin secara terus-menerus, bukan hanya pada saat sekolah membutuhkan bantuan finansial, misalnya saat penerimaan siswa baru atau pembangunan gedung. Prinsip kesinambungan menuntut adanya program hubungan masyarakat yang terstruktur dan terjadwal sepanjang tahun, bukan hanya bersifat insidental. Kesenambungan ini menciptakan ritme relasi yang sehat dan mencegah persepsi negatif bahwa sekolah hanya mendekati masyarakat ketika membutuhkan sesuatu. Komunikasi yang konsisten dan teratur membangun rasa saling mengenal dan memahami yang semakin dalam antara sekolah dan komunitasnya (Daryanto, 2011).

3. Kesederhanaan (*Simplicity*)

Penyampaian informasi atau program menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Prinsip kesederhanaan mengingatkan para pengelola sekolah bahwa masyarakat yang mereka layani memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sangat beragam. Penggunaan jargon teknis pendidikan yang berlebihan dapat menciptakan jarak psikologis dan membuat masyarakat merasa tidak dihargai. Informasi yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana, hangat, dan mudah dipahami justru lebih efektif dalam

membangun kedekatan emosional antara sekolah dan masyarakat.

4. Cakupan Luas (*Coverage*)

Kegiatan hubungan masyarakat harus menjangkau seluruh elemen pemangku kepentingan tanpa membedakan status sosial ekonomi. Prinsip cakupan luas menegaskan bahwa administrasi hubungan sekolah tidak boleh bersifat eksklusif atau hanya mengakomodasi kepentingan golongan tertentu. Setiap orang tua siswa, baik yang berasal dari keluarga mampu maupun kurang mampu, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi dan terlibat dalam kehidupan sekolah. Sekolah yang mampu membangun jembatan komunikasi yang inklusif dan menjangkau semua segmen masyarakat akan memiliki basis dukungan yang jauh lebih kuat dan stabil (Mulyasa, 2013).

Di samping keempat prinsip di atas, beberapa pakar menambahkan prinsip timbal balik (*reciprocity*) sebagai pilar tambahan yang tidak kalah pentingnya. Prinsip timbal balik menekankan bahwa hubungan sekolah-masyarakat harus memberikan manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Sekolah mendapatkan dukungan sumber daya dari masyarakat, sementara masyarakat mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang menjawab kebutuhannya. Hubungan yang dibangun atas dasar saling memberi dan menerima ini akan jauh lebih berkelanjutan dibandingkan hubungan yang bersifat satu arah.

KAJIAN TEORI DAN LANDASAN HUKUM

A. TEORI MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT

Secara teoretis, keterlibatan masyarakat dalam dunia pendidikan berakar dari konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menempatkan otonomi dan partisipasi sebagai pilar utama (Mulyasa, 2019). Teori ini menyatakan bahwa akuntabilitas dan efisiensi pendidikan akan meningkat secara drastis apabila pengambilan keputusan melibatkan para pemangku kepentingan lokal yang memahami dinamika wilayah tersebut (Fattah, 2012). Kemitraan yang sejajar antara birokrasi sekolah dan representasi masyarakat memastikan bahwa orientasi pengelolaan sekolah tetap berpusat pada pemenuhan hak-hak belajar peserta didik secara optimal.

Konsep MBS pertama kali berkembang di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris sebagai respons terhadap kegagalan sistem pendidikan yang terpusat (sentralistik) dalam merespons kebutuhan lokal yang beragam. Di Indonesia, MBS mulai diimplementasikan secara masif pasca reformasi tahun 1998 seiring dengan bergulirnya kebijakan desentralisasi pendidikan. Implementasi MBS di Indonesia diarahkan untuk mendorong sekolah menjadi lebih otonom dalam mengambil keputusan, sekaligus lebih akuntabel terhadap masyarakat yang dilayaninya (Sagala, 2013).

Dalam kerangka MBS, partisipasi masyarakat dipandang bukan sekadar sebagai hak yang perlu dihormati, melainkan sebagai

sumber daya vital yang harus dioptimalkan. Epstein (2011) mengembangkan teori kemitraan sekolah-keluarga-masyarakat (*school-family-community partnership*) yang mengidentifikasi enam jenis keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan, yaitu: parenting (pengasuhan), komunikasi, sukarelawan, belajar di rumah, pengambilan keputusan, dan kolaborasi dengan komunitas. Setiap jenis keterlibatan ini memberikan kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan peserta didik.

Teori ekologi Bronfenbrenner juga memberikan landasan yang kuat bagi pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat. Teori ini memandang perkembangan anak sebagai proses yang dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan yang saling berinteraksi, mulai dari keluarga (mikrosistem), sekolah (mesosistem), komunitas (eksosistem), hingga nilai-nilai budaya masyarakat luas (makrosistem). Implikasi teori ini bagi administrasi hubungan sekolah adalah bahwa sekolah perlu aktif mengelola semua level sistem lingkungan tersebut demi menciptakan kondisi yang paling kondusif bagi perkembangan peserta didik (Hasbullah, 2017).

B. LANDASAN KONSTITUSIONAL (UUD 1945)

Secara tertinggi, konstitusi Negara Republik Indonesia menegaskan amanat pendidikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Makna filosofis dari pasal ini mengindikasikan bahwa pendidikan merupakan agenda nasional (*national program*) yang menyangkut hajat hidup

seluruh bangsa, sehingga pemenuhannya menuntut tanggung jawab kolektif dari negara, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 31 UUD 1945 terdiri dari lima ayat yang secara keseluruhan memberikan landasan komprehensif bagi penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat (1) menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Ayat (2) mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar. Ayat (3) mengamanatkan pengaturan sistem pendidikan nasional melalui undang-undang. Ayat (4) menetapkan prioritas anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD. Sementara ayat (5) mengatur pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keseluruhan ketentuan ini membentuk kerangka konstitusional yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Dari perspektif hubungan sekolah-masyarakat, landasan konstitusional ini memberikan penegasan bahwa pendidikan bukan hanya urusan pemerintah atau lembaga sekolah semata, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Hal ini secara implisit mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk melalui keterlibatan aktif dalam lembaga-lembaga representasi seperti komite sekolah. Dengan demikian, administrasi hubungan sekolah yang baik sesungguhnya merupakan perwujudan nyata dari amanat konstitusi yang paling mendasar.

C. LANDASAN YURIDIS: UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan regulasi payung (*umbrella act*) yang secara eksplisit mengatur peran serta masyarakat. Berdasarkan

- a. Pentingnya memahami administrasi pendidikan bagi calon guru. Bagi calon guru, administrasi pendidikan bukan sekadar urusan berkas di ruang tata usaha, melainkan sebuah instrumen strategis untuk menjamin kelancaran pembelajaran di kelas. Memahami administrasi Husemas menyadarkan calon guru bahwa keberhasilan mendidik siswa sangat dipengaruhi oleh sinergi yang harmonis dengan orang tua dan lingkungan sosial di luar pagar sekolah.
- b. Kompetensi administrasi yang perlu dimiliki oleh pendidik. Seorang pendidik harus memiliki kompetensi komunikasi sosial dan kompetensi manajerial yang lentur. Pendidik tidak hanya dituntut mampu mengajar, tetapi juga harus cakap dalam berkoordinasi lintas sektoral, mengelola dinamika kelompok dalam rapat komite, serta piawai menggunakan media digital (seperti WhatsApp) secara bijak untuk kepentingan koordinasi edukatif.
- c. Peran administrasi yang diteliti dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu sekolah. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat terbukti berperan sebagai katalisator dalam peningkatan mutu madrasah. Melalui pengelolaan hubungan yang transparan, madrasah berhasil memperoleh pasokan bantuan non-finansial (saran, kritik membangun, tenaga gotong royong) serta bantuan finansial sukarela (infak renovasi, donasi pembangunan). Ketersediaan sarana prasarana yang memadai dari hasil sumbangsih ini secara langsung mendongkrak kualitas fasilitas dan kenyamanan belajar mengajar.
- d. Kesiapan mahasiswa menghadapi praktik pengelolaan pendidikan di masa depan. Melalui pengalaman menganalisis studi kasus nyata ini, mahasiswa menjadi lebih siap secara mental dan konseptual untuk terjun ke dunia kerja. Mahasiswa tidak lagi

gagap saat menghadapi tantangan riil di sekolah masa depan, seperti menghadapi keluhan wali murid, mengoordinasikan anggaran bersama komite, atau merangkul tokoh masyarakat karena telah memiliki bekal potret nyata bagaimana solusi-solusi praktis di lapangan diterapkan secara bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, I. A., Aulia, F., Makalunsenge, R., & Rahmat, A. (2023). Digitalisasi Hubungan Masyarakat Berbasis Website di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1).
- Ahmadi, A., & Uhbiyati, N. (2015). *Ilmu pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S., & Yuliana, L. (2012). *Manajemen pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Asiyani, G., Afandi, N. K., & Asiah, S. N. (2023). Perencanaan Komunikasi Kemitraan Untuk Mendukung Pelaksanaan Awal Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. *Jurnal Anak Usia Dini Holistik Integratif (AUDHI)*, 6(1), 37–46.
- Asrul Anan, "Strategi Hubungan Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Al-Murabbi*, Vol. 1, No. 1, 2016., h.180-181.
- Burhanuddin. (2014). *Analisis administrasi manajemen dan kepemimpinan pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daryanto, H. (2011). *Administrasi pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Epstein, J. L. (2011). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools* (2nd ed.). Boulder, CO: Westview Press.
- Epstein, J. L., & Sheldon, S. B. (2016). Necessary but not sufficient: The role of policy for advancing programs of school, family, and community partnerships. *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences*, 2(5), 202–219.

- Epstein, J. L., & Sheldon, S. B. (2016). Necessary but Not Sufficient: The Role of Policy for Advancing Programs of School, Family, and Community Partnerships. *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences*, 2(5), 202–219.
- Fattah, N. (2012). *Sistem penjaminan mutu pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fitri, N. A., & Masyithoh, S. (2024). Peran Humas Sekolah dalam Menjalin Kemitraan dengan Dunia Industri. *Al-Gafari: Manajemen dan Pendidikan*, 2(3).
- Fortunisa, A. (2022). Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Industri. *Indonesian Journal of Social Responsibility*, 4(2), 87–101.
- Goodall, J., & Montgomery, C. (2016). Parental Involvement to Parental Engagement: A Continuum. *Educational Review*, 69(4), 399–410.
- Hajar, D. D., Mawaddah, E. M., Fitriatuzzuhria, H., Sulusiyah, S., & Mu'alimin, M. (2024). Peran komunikasi efektif dalam penyelesaian konflik. *Jurnal Pelita Nusantara*, 2(3), 277–285.
- Handini, O., Mustofa, M., Artikel, I., & Kunci, K. (2020). Optimalisasi komunikasi antar pribadi dalam pendidikan menuju generasi emas pada guru dan orangtua peserta didik di SD Kestalan Surakarta. *Isparwoto*. (2012). Komunikasi dalam penyelesaian konflik di sekolah dasar.
- Hardianto, D. (2022). Analisis Program dan Model Kemitraan Blended Partisipatif Sekolah dan Orang Tua. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 9(2), 232–243.
- Hariesa, A., Ahmad, S., & Wahidy, A. (2021). Manajemen Hubungan Sekolah dengan Orang Tua Siswa dalam Upaya Peningkatan Kualitas Sekolah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6773–6780.

- Harris, A. L., & Robinson, K. (2016). A new framework for understanding parental involvement: Setting the stage for academic success. *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences*, 2(5), 186–201.
- Hasanah, A., Fitri, N. I., Rahmadani, S., Sabirah, P., & Rizqa, M. (2024). Hubungan Administrasi Sekolah dengan Masyarakat dalam Meningkatkan Pendidikan. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 3(2), 41–51.
- Hasbullah. (2017). *Dasar-dasar ilmu pendidikan (Edisi revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ihsanuddin. (2017). Pemerintah Blokir 6 Situs Tenor, Kenapa Gif Pornografi di WhatsApp Masih Bisa Diakses. <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/06/15023941/pemerintah-blokir-6-situs-tenor-kenapa-gif-pornografi-di-whatsapp-masih-bisa>.
- Irwan, I., Nuryani, N., & Masruddin, M. (2023). Kolaborasi Sekolah dengan Orang Tua dalam Meningkatkan Proses Belajar Peserta Didik. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 8(1), 12–25.
- Jamilah, J. (2019). Kemitraan Pendidikan Anak Usia Dini (Sinergi Tiga Pilar Pendidikan: Risnajayanti, R., & Nurlina, N Strategi Manajerial Kepala Sekolah dalam..... [251-265] 264 | *Ceria (Cerdas Energik Responsif Inovatif Adaptif*, 8 (3), 2025, 251–265 *Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*). *Simulacra*, 2(2), 181–194.
- Juwariyah. 2010. *Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Teras
- Kartika, K., Arifin, I., Pramono, P., & Suyitno, S. (2022). Keefektifan Komunikasi untuk Menjalin Hubungan antara Pendidik dengan Orang Tua Siswa dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6202–6211.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Jakarta: Kemendikbud.
- Kent, M. L., & Taylor, M. (1998). Dialogic theory of public relations. *Public Relations Review*, 24(1), 55–67.
- Kristiawan, Muhammad, dkk. *Manajemen Pendidikan*. Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2017. H. 2.
- Kurniawati, N. B., & Pardimin. (2021). Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat dalam Mewujudkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar. *Media Manajemen Pendidikan*, 3(3), 484–494.
- Langrafe, T. D. F., Barakat, S. R., Stocker, F., & Boaventura, J. M. G. (2020). A stakeholder theory approach to creating value in higher education institutions. *The Bottom Line*, 33(4), 297–313.
- Manafe, M. P., Intifada, A. Y., & Marmoah, S. (2026). Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat di Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1).
- Meliani, M., Ahmad, N. S., Podungge, Y. S., & Rahmat, A. (2023). Komunikasi Hubungan Masyarakat Sekolah Melalui Local Genius atau Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1).
- Moh. Saifulloh, dkk. “Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah”, *Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 2, November 2012, h. 207-208.
- Mulditasari, Y., Lusiana, & Noviani, D. (2023). Hubungan Sekolah dan Masyarakat dalam Menjamin Mutu Pendidikan. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(2), 525–538.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mulyasa, E. (2019). Implementasi kurikulum 2013 revisi dalam era industri 4.0. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nulchakim, L., Ulfatin, N., & Gunawan, I. (2024). Pola dan bentuk komunikasi dalam konteks hubungan sekolah masyarakat di SMK Negeri 1 Singosari. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan*, 4(11), 9.
- Nurahmadi, I., Novianti, M., & Silviana, A. (2024). Komunikasi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar.
- Persada, N. M., Pramono, S. E., & Murwatiningsih. (2017). Pelibatan Orang Tua pada Pendidikan Anak di SD Sains Islam Al Farabi Sumber Cirebon. *Educational Management*, 6(2), 100–108.
- Pidarta, M. (2009). Manajemen pendidikan Indonesia (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Presiden Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Putri, S. A. (2015). *Excellent Public Relations and Effective Organizations - Models of Public Relations*. Bandung.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Risnajayanti, & Nur, N. (2025). Strategi Manajerial Kepala Sekolah dalam Kemitraan dengan Orang Tua untuk Pendidikan Anak Usia Dini. *CERIA (Cerdas Energik Responsif Inovatif Adaptif)*, 8(3), 335–344.
- Rusuli, I., & Damayanti, S. (2023). Pelibatan Keluarga dalam Program Sekolah untuk Menanamkan Kedisiplinan Anak Usia Dini. *EL-Hadhary: Jurnal Penelitian Pendidikan Multidisiplin*, 1(01), 16– 30.
- Sagala, S. (2013). Kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sihung. (2020). Esensi komunikasi pendidikan.
- Simamora, I. Y., Dalilah Balqis, F., Ardianti, I., & Siregar, S. A. (2024). Peran komunikasi dalam membangun melek literasi.
- Soetopo, H., & Soemanto, W. (2010). Kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Malang: Bina Aksara.
- Stocker, F., de Arruda, M. P., de Mascena, K. M., & Boaventura, J. M. (2020). Stakeholder engagement in sustainability reporting: A classification model. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(5), 2071–2080.
- Suharyat, Y., Nurhayati, S., Januliawati, D., Haryono, P., Muthi, I., & Zubaidi, M. (2023). Tantangan Pemberdayaan Orang Tua dalam Meningkatkan Mutu Layanan PAUD Era Digital. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(1), 406–415.
- Wahid, A., Naqdzan Desmaniar, M., & Fahrizal Basri, M. (2026). Komunikasi konflik dan resolusi di lembaga pendidikan islam.

- Wahjosumidjo. (2011). *Kepemimpinan kepala sekolah: Tinjauan teoritik dan permasalahannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyudin, A., Rohman, A., & Fauziah, U. (2023). Implementation of public relations management development at boarding schools in the Smart Society 5.0 era. *AL- WIJDÂN Journal of Islamic Education Studies*, 8(2), 237–252.
- Wilanten, W., Rofisian, N., & Suwartini, S. (2024). Peran literasi digital dalam meningkatkan karakter gemar membaca siswa kelas IV SD Negeri 2 Tambongwetan Tahun Pelajaran 2023/2024.

PROFIL PENULIS



Alexandria Threeddy Jannatun Nisa

Penulis lahir di Sragen pada tanggal 13 November 2006. Pada saat ini penulis sedang menempuh pendidikan strata 1 pada program studi pendidikan agama Islam di Institut Islam Mambaa'ul 'Ulum Surakarta dan berada di semester VI. Selama masa perkuliahan, penulis lebih memilih untuk fokus pada kegiatan akademik dan pengembangan diri. Penulis juga memiliki ketertarikan terhadap dunia Pendidikan, khususnya pada Pendidikan Agama Islam, serta beberapa kajian yang berkaitan dengan psikologi. Dengan minat tersebut, penulis terdorong untuk terus mempelajari tentang bagaimana proses perkembangan, perilaku, dan karakter seseorang dapat dipengaruhi oleh pendidikan dan lingkungan. Melalui beberapa mata kuliah yang telah ditempuh, penulis memperoleh pengalaman dan wawaasan yang menjadi bekal dalam memahami dunia pendidikan. Selain itu, penulis juga memiliki minat dalam bidang penelitian pendidikan, sebagai sebuah sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis seta menambah pengetahuan penulis. Penulisan buku ini merupakan salah satu bentuk proses belajar sekaligus kontribusi penulis dalam bidang pendidikan. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.



Amin Ayu Permatasari

Penulis lahir di Sukoharjo pada tanggal 14 Agustus 2003. Penulis merupakan mahasiswa semester VI Pendidikan strata 1 pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Mambaa'ul 'Ulum Surakarta yang memiliki minat dan fokus pada bidang pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI).

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif mengembangkan kapasitas akademik dan keterampilan diri melalui berbagai kegiatan pembelajaran, penelitian, serta pengembangan kompetensi di bidang pendidikan. Selain menjalani aktivitas perkuliahan, Ayu juga mengabdikan diri sebagai pendidik di PAUD IT Al-Mukmin Ngruki, sebuah pengalaman yang memberikan kesempatan untuk memahami dunia pendidikan secara langsung, mulai dari proses pembelajaran hingga pembentukan karakter peserta didik sejak usia dini. Pengalaman tersebut semakin memperkuat ketertarikan penulis terhadap pengembangan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Selama masa studi, penulis beberapa kali mengikuti berbagai perlombaan karya tulis ilmiah yang diselenggarakan di lingkungan kampus. Melalui kompetisi tersebut, Ayu berhasil meraih beberapa sertifikat yang menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas berpikir kritis, kemampuan riset, serta keterampilan akademik. Penulis meyakini bahwa proses belajar tidak berhenti di ruang perkuliahan, melainkan berlangsung sepanjang hayat melalui interaksi, refleksi, penelitian, dan berbagai pengalaman yang memperkaya wawasan.



Harun Arasid

Penulis lahir di Dompu pada tanggal 13 September 2002. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan Strata 1 di Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Sejak awal perkuliahan, penulis memiliki ketertarikan yang besar dalam bidang pendidikan, keislaman, dan pengembangan karakter generasi muda. Aktif sebagai mahasiswa, penulis juga mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pengalaman mengajar ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi penulis dalam memahami karakter peserta didik, menerapkan strategi pembelajaran yang efektif, serta membangun lingkungan belajar yang positif dan bermakna. Di samping itu, penulis juga aktif mengajar privat tahsin Al-Qur'an. Kegiatan ini menjadi bagian dari kontribusi penulis dalam membantu peserta didik memperbaiki bacaan Al-Qur'an sesuai kaidah tajwid yang baik dan benar. Melalui aktivitas ini, penulis semakin memahami pentingnya pendidikan Al-Qur'an sebagai pondasi utama dalam pembentukan akhlak dan karakter islami. Dalam bidang sosial dan keagamaan, penulis aktif sebagai aktivis masjid yang terlibat dalam berbagai kegiatan keislaman, dakwah, dan pembinaan masyarakat. Penulis juga aktif dalam kegiatan sosial bersama komunitas Ulur Tangan, khususnya dalam program berbagi dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Keterlibatan dalam kegiatan tersebut membentuk penulis menjadi pribadi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap nilai-nilai keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Selain aktif di bidang pendidikan dan sosial, penulis juga memiliki minat besar dalam bidang olahraga, khususnya sepak bola dan futsal. Penulis tergabung dalam SSB Fortuna Solo FC serta

aktif sebagai bagian dari Tim Futsal FOV Makam Haji. Melalui kegiatan olahraga, penulis belajar tentang pentingnya disiplin, kerja sama tim, sportivitas, serta semangat juang dalam mencapai tujuan bersama. Dalam dunia akademik, penulis memiliki minat yang besar pada kajian Pendidikan Agama Islam, strategi pembelajaran, serta penelitian yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan. Bagi penulis, pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi juga sarana membentuk karakter, akhlak, dan masa depan generasi bangsa. Melalui karya tulis ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pendidikan Agama Islam, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berlandaskan Arasid.



Muhammad Hamam Hanif

Penulis lahir di Klaten 07 April 2005. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan Strata 1 di Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Sejak awal perkuliahan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik dan organisasi sebagai sarana pengembangan wawasan, kepemimpinan, serta keterampilan manajerial. Dalam kegiatan kemahasiswaan, penulis pernah dipercaya menjabat sebagai Bendahara Umum III Koperasi Mahasiswa (KOPMA). Melalui amanah tersebut, penulis memperoleh pengalaman dalam pengelolaan keuangan organisasi, administrasi, serta pengembangan jiwa kewirausahaan. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti berbagai seminar dan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan pemahaman mengenai dunia usaha, manajemen, dan pengembangan sumber daya manusia. Di lingkungan masyarakat, penulis berperan sebagai Sekretaris Takmir Masjid di tempat tinggalnya. Keterlibatan ini memberikan pengalaman dalam mengelola administrasi masjid, menyusun program kegiatan keagamaan, serta membangun komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat. Selain aktif dalam organisasi, penulis juga mengabdikan diri di bidang pendidikan sebagai guru Bahasa Arab dan Tahfiz Al- Qur'an di SD Muhammadiyah 19 Kemlayan. Melalui kegiatan mengajar tersebut, penulis berupaya menanamkan nilai-nilai keislaman, meningkatkan kemampuan berbahasa Arab peserta didik, serta membimbing mereka dalam menghafal Al-Qur'an. Pengalaman mengajar ini turut mengembangkan kompetensi pedagogik, komunikasi, dan profesionalisme penulis sebagai calon pendidik. Berbagai pengalaman organisasi, sosial, dan pendidikan yang dimiliki menjadi

bekal berharga bagi penulis dalam memahami dinamika pendidikan Islam serta pengembangan karakter peserta didik. Melalui karya ilmiah ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

IMPLEMENTASI ADMINISTRASI HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN KOMITE SEKOLAH DAN MASYARAKAT DI MI MUHAMMADIYAH TARAMAN SIDOHARJO SRAGEN

Hubungan yang harmonis antara sekolah, komite sekolah, dan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, melalui buku ini penulis berusaha menguraikan konsep, landasan teori, serta implementasi hubungan sekolah dengan komite sekolah dan masyarakat yang ditemukan di lapangan. Diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi mahasiswa, pendidik, maupun pembaca yang memiliki perhatian terhadap bidang administrasi pendidikan.



IKAPI

CV. Tahta Media Group
Sukeharjo, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.co.id
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896 5427 3996



ISBN : 978-602-880-800-0